

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badriah, Chairul. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Bandung: Erlangga.
- HS, Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Cetakan Kesatu, Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke IX. Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke VI. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Syahrudin, Nawid. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 91).

### C. JURNAL/ARTIKEL

Budi Bahreisy. “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi (Criminal of Perpetrators of Use of Illegal Radio Frequencies under the Act of Telecommunication).*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No. 3, 2017. 16 Halaman <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.265-276>

Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.* *Jurnal Warta Edisi* Vol. 16 Halaman 59. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.* *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020. 14 Halaman <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

- Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. 2018. *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.1. 16 Halaman  
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)
- Rosnawati, Din, Mohd., & Mujibussalim. 2016. *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No, 1. 16 Halaman  
<https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.671>
- Tri Wahyu Widiastuti. 2010. *Upaya Pencegahan TPPO*. Jurnal FH UNSRI, Vol. 9. 14 Halaman DOI: <https://doi.org/10.33061/wh.v9i1.308>
- Vivi Ariyanti. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2. 17 Halaman  
<https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

#### **D. INTERNET**

- Rumondang Naibaho, Diakses di halaman Detik News,  
<https://news.detik.com/berita/d-6706104/tangani-405-kasus-tpo-di-2020-2023-bareskrim-tetapkan-517-orang-tersangka>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.
- Handar Subhandi. 2016. *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)* “.  
<http://handarsubhandi.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

## **E. LAIN-LAIN**

Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H  
Selaku Penyidik Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum  
Unit II Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Media Indonesia, Diakses di <https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Rumondang Naibaho, Diakses di halaman Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6706104/tangani-405-kasus-tpo-di-2020-2023-bareskrim-tetapkan-517-orang-tersangka>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.